

Nama : Stevanus Andika Galih Setiawan

Kelas : RK231

Mapel : PKN

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar, dengan ketentuan setiap aitem pertanyaan, jawaban minimal 8 baris. Jawaban langsung di kerjakan di eleraning  
Jawaban yang diupload dalam bentuk PDF.

Soal :

1. Berikan Beberapa Alasan dan Jelaskanlah begitu Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.
2. Sebagai Warga Negara yang Kita Mempunyai Kewajiban Terhadap Negara
  - a. Sebutkanlah dan Jelaskanlah Minimal 4 Kewajiban Warga Negara untuk Menjaga Kesatuan NKRI.
  - b. Bagaimana Peran Mahasiswa Untuk tetap Menjaga Kesatuan NKRI jelaskanlah.
3. Hak asasi Manusia adalah HaK yang Muntlak di Miliki setiap Manusia Di Dunia.
  - a. Sebutkanlah dan Jelaskanlah Minimal 4 Macam yang Menjadi Latar Belakang di Rumuskannya Hak asasi di Indonesia.
  - b. Sebutkanlah dan jelaskanlah Minimal 4 Macam yang Menjadi latar Belakang Di rumuskan nya Hak Asasi Manusia di PBB.
4. Indonesia Menganut Demokrasi Pancasila jelaskanlah Maksud dari Demokrasi Pancasila.
5. Indonesia Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial
  - a. Jelaskan Apa yang di maksud dengan Sistem Presidensial.
  - b. Jelaskanlah Sistem Pemerintahan Parlementer.
  - c. Apa perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer Sebutkanlah Minimal 4 Perbedaan tersebut dan jelaskanlah

Jawaban :

1. Adapun manfaat yang bisa diambil dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sebagai berikut :

- A. Menumbuhkan sikap cinta tanah air dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia
- B. Pendidikan Kewarganegaraan dapat membuat para mahasiswa/mahasiswi dapat berpikir dengan kritis.
- C. Pendidikan kewarganegaraan dapat memperbaiki moral dan etika mahasiswa/mahasiswi.
- D. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk pengamalan dari butir nilai-nilai Pancasila
- E. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan mahasiswa dan mahasiswi menghargai keberagaman suku, budaya, agama dan adat istiadat.
- F. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan mahasiswa dan mahasiswi untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, spt musyawarah, gotong royong, dll.
- G. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan mahasiswa/mahasiswi agar ketika berani berbuat, mahasiswa/mahasiswi dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.
- H. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan mahasiswa dan mahasiswi untuk berpikir kritis dan kreatif.

2. A. Adapun kewajiban Kewajiban Warga Negara untuk Menjaga Kesatuan NKRI adalah sebagai berikut :

- Menghormati sesama dalam keberagaman
- Mematuhi peraturan perundang-undangan dan hukum yang ada di Indonesia
- Mengamalkan butir-butir dalam nilai Pancasila.
- Memajukan Indonesia lewat Pendidikan (memberikan prestasi yang mengharumkan nama Indonesia, dll)

B. - Menghargai dan menghormati sesama yang berbeda

- Menghormati dosen dan berbicara dengan sopan ketika bertemu dengan dosen
- Berperan aktif ketika dalam pembelajaran, baik luring maupun daring
- Ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus, sesuai dengan minat dan bakat.
- Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, yang diselenggarakan oleh lingkungan RT/RW
- Mencetuskan ide/gagasan serta inovatif
- Berpikir Kreatif Dan Kritis.
- Menghargai Pendapat Orang Lain
- Tidak memandang rendah orang lain

- Menjujung Tinggi Keadilan
- Berteman tanpa memandang suku, agama, dan budaya.

3.A. Berikut adalah 4 hal yang menjadi latar belakang dirumuskannya hak asasi di Indonesia :

- UUD 1945 : fondasi dasar hak asasi manusia di Indonesia tercermin dalam UUD 1945 yang mengakui hak asasi setiap warga negara. ketentuan UUD 1945 mengatur hak-hak dasar seperti hak kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi undang-undang.
- Konvensi hak asasi manusia internasional: Indonesia sebagai negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengakui dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam banyak konvensi internasional. partisipasi Indonesia dalam komunitas internasional memperkuat komitmen Indonesia untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesuai standar internasional.
- Pancasila : pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Dasar Pembangunan Hak Asasi Manusia. nilai-nilai pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan menjadi alasan untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu.
- Kemerdekaan Indonesia : Sejarah perjuangan kemerdekaan: \*\*Hak Asasi Manusia di Indonesia mempunyai akar sejarah dalam perjuangan kemerdekaan dari penjajahan.  
Pengalaman pahit masa kolonial menjadi sumber inspirasi untuk menjamin seluruh hak dan martabat warga sipil dihormati.

B. - Prinsip universalitas dan keselarasan budaya: Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui prinsip universalitas hak asasi manusia, yang berarti bahwa hak-hak ini berlaku untuk semua individu tanpa memandang ras, agama atau budaya. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keselarasan antara nilai-nilai lokal dan universal.

-Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR): UDHR yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948 menjadi tonggak penting dalam pengembangan hak asasi manusia di PBB. Dokumen ini merinci hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara anggota, memberikan dasar bagi pengembangan dokumen hukum internasional terkait hak asasi manusia.

- Pengalaman Perang Dunia II: Setelah Perang Dunia II, penderitaan yang sangat besar dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis memotivasi komunitas internasional untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Hal inilah yang menjadi konteks utama pembentukan PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

-Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR): UDHR yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948 menjadi tonggak penting dalam pengembangan hak asasi manusia di PBB.

Dokumen ini merinci hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara anggota, memberikan dasar bagi pengembangan dokumen hukum internasional terkait hak asasi manusia.

#### 4. Adapun pengertian Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang memadukan prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dasar negara Indonesia. Dalam hal ini, demokrasi dipandang tidak hanya sebagai proses politik, namun juga sebagai wujud implementasi prinsip-prinsip Pancasila.

Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang adil, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Demokrasi Pancasila menekankan keberagaman, musyawarah untuk mufakat, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Oleh karena itu, demokrasi ini berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa komponen dalam demokrasi pancasila :

- Sila sila dalam pancasila Pancasila: Berkomitmen pada nilai-nilai inti Pancasila, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, solidaritas, demokrasi Indonesia yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam pertimbangan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Diskusi dan Mufakat: Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat. Keputusan diambil melalui proses yang bijaksana dan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak.
- Perlindungan Minoritas: Prinsip demokrasi Pancasila berkaitan dengan perlindungan hak minoritas. Hal ini mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.
- Keadilan dan Kesetaraan: Prinsip demokrasi Pancasila mendorong terbentuknya pemerintahan yang adil, merata, dan menghormati hak asasi manusia.
- Partisipasi Aktif Warga Negara: Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, melalui pemilihan umum dan berbagai mekanisme partisipasi lainnya.

5.A.Adapun pengertian dari Sistem Presidensial.dan Sistem Pemerintahan Parlemonter adalah sebagai berikut :

Sistem presidensial adalah suatu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (presiden) dipilih secara terpisah dari lembaga legislatif dan mempunyai kekuasaan eksekutif yang independen.

Presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah dan tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif saat masih menjabat.

B. sistem pemerintahan parlementer adalah system pemerintahan yang mencakup hubungan erat antara eksekutif dan legislatif.

Kepala negara dan kepala pemerintahan bisa berbeda, kepala negara adalah raja atau presiden, sedangkan kepala pemerintahan biasanya adalah perdana menteri di badan legislatif.

Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen dan dapat digantikan jika ia kehilangan dukungan mayoritas di Parlemen.

C. – Kekuasaan pemerintahan tertinggi : Presidensial: Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan mempunyai kekuasaan eksekutif tertinggi. Sedangkan parlemen Kepala negara dan kepala pemerintahan mungkin berbeda, dengan kepala pemerintahan (misalnya Perdana Menteri) bertanggung jawab kepada Parlemen.

- Cara Pemilihan : Presidensial :Presiden dipilih secara terpisah dan langsung oleh rakyat, sedangkan Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab pada parlementer yang bersangkutan.

- Pembagian Kekuasaan : Presidensial terdiri dari eksekutif,yudikatif dan legislative, sedangkan Pemisahannya tidak terlalu ketat, badan eksekutif (kabinet) berkedudukan di Parlemen.

- Kestabilan dalam pemerintahan: Presidensial:Stabilitas pemerintahan cenderung lebih tinggi karena masa jabatan presiden tetap.sedangkan Pemerintah bisa bereaksi lebih cepat terhadap perubahan karena bisa runtuh jika kehilangan dukungan mayoritas di Parlemen.

